



RENCANA KERJA

SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI TAHUN 2025



**SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI
JL. CHAIRIL ANWAR NO 112**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami Panjatkan Kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan. Renja Kerja yang disusun oleh Sekretariat DPRD Kota Bekasi merupakan dokumen perencanaan yang membuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada Tahun 2025. Ranwal Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi diharapkan dapat memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam mencapai tujuan organisasi sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), serta arahan kebijakan yang telah ditetapkan sehingga seluruh daya dan upaya yang akan dilakukan dapat berjalan secara sinergis dalam suatu pola sikap dan tindak.

Renja juga merupakan sebagai landasan operasional penyusun program dan kegiatan prioritas pada Tahun 2025 dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi pada Tahun 2023.

Kepada semua pihak yang telah mengerahkan tenaga dan pikiran dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025 ini kami sampaikan ucapan terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa emberikan petunjuk dan memberkahi langkah serta upaya kita dalam meningkatkan kinerja guna mewujudkan RPD.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal Mei 2024

Plt. Sekretaris DPRD Kota Bekasi



Ahmad Sahroni, S.Sos, M.Si
Pembina/IVa

NIP. 19740706 200604 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR CHART	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN LALU ...	12
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2021 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi	12
2.2. Analisis Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi	21
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD	29
2.4. <i>Review</i> terhadap Rancangan Awal RKPD	31
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	43
BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI ..	44
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	44
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi	55
3.3. Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bekasi	59
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI	69
BAB V PENUTUP	88

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja SKPD Sekretariat DPRD Kota Bekasi Pada RPJMD Murni 2018-2023	9
Tabel 2.2. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja SKPD Sekretariat DPRD Kota Bekasi Pasa RPJMD Perubahan 2018-2023 .	10
Tabel 2.3. Evaluasi Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2023	14
Tabel 2.4. Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2023 Terhadap indicator Kinerja Utama	21
Tabel 2.5. Capaian IKU Prosentase Raperda yang difinalisasikan menjadi Perda tepat waktu	22
Tabel 2.6. Capaian IKU Prosentase Pengesahan Anggaran Tepat Waktu	24
Tabel 2.7. Capaian IKU Prosentase Pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu	25
Tabel 2.8. Penilaian Sakip	27
Tabel 2.9. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran	27
Tabel 2.10 <i>Review</i> Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Bekasi Tahun 2025	33
Tabel 2.11 Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025	43
Tabel 3.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan	51
Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD	57
Tabel 3.3. Rumusan Rencana program dan kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026	60
Tabel 3.4. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD kota Bekasi Tahun 2025	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Keterkaitan Tahapan Penyusunan Renja Dengan RKPD ...	2
Gambar 3.1. Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bekasi 2024-2026	46
Gambar 3.2. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Bekasi	66

DAFTAR CHART

<i>Chart</i> 1.1.	Kualifikasi Pegawai Pada Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi	67
-------------------	---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU-SPPN) mengamanatkan bahwa setiap pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai Rencana Tahunan. Dalam menyusun dokumen RKPD, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi. RKPD Kota Bekasi Tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen Perencanaan Tahunan dan penyusunannya memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang Tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Sesuai amanat tersebut, maka Sekretariat DPRD Kota Bekasi sebagai Perangkat Daerah pada Tahun 2023 menyusun Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025.

Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 dibuat berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023.

Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 memuat permasalahan-permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan memuat Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun berjalan.

Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh Aparat Sekretariat DPRD Kota Bekasi untuk melaksanakan tugasnya menjalankan Program dan Keegiatannya

Pokok dan Fungsi, serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian target.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali Perubahan Ketiga dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402) status mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
12. Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SiDa) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

- Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indoneisa Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klafikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verivikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berkahir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
 22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tetang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembarab Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 13 Seri E);
 23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 10, Seri E);
 24. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);

25. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 1);
26. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 21 Seri E);
27. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 9 Seri E);
28. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 01.A Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 1.A Seri E);
29. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan social yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 14 Seri E);
30. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11.A Tahun 2021 tentang Kelembagaan Perencanaan dan Penganggaran melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 11.A Seri E);
31. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 100 Seri D).
32. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yang memuat :

1. Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025.
2. Lokasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025.
3. Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025.
4. Kelompok Sasaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi .
5. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 adalah :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah khususnya aspek perencanaan dalam rangka memberikan pelayanan prima pada DPRD Kota Bekasi dan masyarakat;
2. Memberikan gambaran kemampuan Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam melaksanakan tujuan serta sasaran dalam mencapai Misi dan mewujudkan Visi Kota Bekasi;
3. Menjadi acuan bagi seluruh kegiatan perencanaan program pembangunan yang dilakukan oleh semua unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Bekasi;
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan berkelanjutan;
5. Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025; dan
6. Menjadi alat observasi untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pejabat/pimpinan instansi.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bagian ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Sekretariat DPRD sudah disahkan dan pencapaian Renja sampai dengan Triwulan II Tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Sekretariat DPRD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Pada bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang

sudah ditentukan dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah memiliki beberapa tugas dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrated terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Pada bagian ini berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Sekretariat DPRD dalam rangka penyampaian kinerja pembangunan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat DPRD, serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program, dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Ranwal RKPD

Pada bagian ini berisikan uraian mengenai proses membandingkan antara Ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, dan penjelasan apabila ada temuan-temuan dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Ranwal RKPD, misal terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Ranwal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbentuk Lampiran table.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kota Bekasi yang langsung ditujukan kepada

Sekretariat DPRD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Sekretariat DPRD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Pada bagian ini dilakukan telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Pada bagian ini dirumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

3.3 Program dan Kegiatan

Pada bagian ini berisikan rumusan rencana program dan kegiatan disertai penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI

Berisikan penjelasan mengenai Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika program dan kegiatan tidak sesuai dengan Ranwal RKPD, baik jenis program/ kegiatan, pagu Indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Berisikan penjelasan mengenai :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan (misal: pencapaian visi dan misi kepala daerah);
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain: jumlah program, dan jumlah kegiatan, sifat penyebaran

- lokasi lokasi program dan kegiatan dan total kebutuhan dana/ pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaan;
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Ranwal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya;
 4. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini diuraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2023 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Kegiatan review hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Untuk mencapai keberhasilan RPJMD maka dapat kita dilihat dari capaian indikator yang ada pada Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi. Pada Tahun 2019 dan 2020, Sekretariat DPRD Kota Bekasi memiliki 3 (tiga) indikator sasaran, seperti tampak pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SKPD SEKRETARIAT DPRD KOTA PADA RPJMD MURNI 2018-2023

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET RENSTRA SKPD					REALISASI CAPAIAN				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	76,61	76,71	-	-	-	76,78	76,98	-	-	-
	Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu	Persen (%)	50	50	-	-	-	100	100	-	-	-
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	76,61	76,71	-	-	-	82,46	84,71	-	-	-

Sumber : Data diolah Sub. Bagian Perencanaan dan Penganggaran.

Tampak pada tabel di atas, realisasi capaian renstra, yaitu : Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD, Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu, dan Indeks Kepuasan Masyarakat telah mencapai target Renstra.

Tahun 2021 terdapat perubahan indikator sasaran menjadi 4 (empat) indikator sasaran, seperti tampak pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SKPD SEKRETARIAT DPRD
KOTA PADA RPJMD PERUBAHAN 2018-2023

NO	INDIKATOR SASARAN	IKU	TARGET RENSTRA SKPD (%)					REALISASI CAPAIAN(%)				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu	Persen (%)	-	-	75	75.10	75.20	-	-	87,51	65.22	80
	Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu	Persen (%)	-	-	75	75,1	75,2	-	-	100	100	100
	Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu	Persen (%)	-	-	75	75,1	75,2	-	-	100	100	100
	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	-	-	77,4	77,5	77,6	-	-	69,56	70.08	63,38

Sumber : Data diolah Sub. Bagian Perencanaan dan Penganggaran.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan oleh Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam jangka waktu 5 tahun yang dijabarkan dalam kegiatan tahunan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran harus menggambarkan hasil yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Dalam rangka mencapai misi organisasi.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2023 melaksanakan 2 (dua) Program, 16 (enam belas) Kegiatan dan 56 (lima puluh enam) Sub Kegiatan, dengan anggaran murni sebesar Rp. 201.444.734.098,- (Dua Ratus Satu Miliar Empat Ratus Empat Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Puluh Delapan Rupiah), serta anggaran perubahan sebesar Rp.184.951.581.620,- (Seratus Delapan Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam ratus Dua Puluh Rupiah).

Hasil evaluasi capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi tahun 2023 secara rinci ditunjukkan dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
EVALUASI CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2023

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2023	Realisasi Th. 2023	Tingkat Capaian %	Keterangan
I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota						
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Tersedianya Dokumen dan Laporan Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25 Dok	25	100	
2.	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Lap	3	100	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang meneima gaji dan tunjangan ASN	55 org/ bln	55	100	
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	1	100	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
5.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	32 Org	32	100	
6.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	48 Org	48	100	
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Tersedianya Kegiatan Pada Administrasi Umum Perangkat Daerah						
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1	100	
8.	Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah pake bahan logistic kantor yang disediakan	4 paket	4	100	

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2023	Realisasi Th. 2023	Tingkat Capaian %	Keterangan
9.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cerakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	4	100	
10.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	4 Dok	4	100	
11.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Lap	1	100	
12.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	1	100	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
13.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	13 Paket	13	100	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
14.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	750Laporan	750	100	
15.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	4 Paket	3	75	
16.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang disediakan	1.236 Org/ bln	1.236	100	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
17.	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	1	100	
18.	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	31 unit	31	100	

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2023	Realisasi Th. 2023	Tingkat Capaian %	Keterangan
19.	Pemeliharaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 paket	1	100	
20.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	11 paket	11	100	
21.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	24.757 meter persegi	24.757	100	
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				
22.	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	600 org/ bln	600	100	
23.	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Paket	5	100	
24.	Pelaksanaan Medical Chek Up DPRD	Jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD	50 org	25	50	25 Dewan melakukan MCU secara mandiri sebagai syarat mengikuti Caleg 2024
Layanan Administrasi DPRD		Tersedianya Laporan Administrasi DPRD				
25.	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	40 Lap	40	100	
II. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSNAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						
Persentase Terasfasilitasinya Proses Penyusunan dan Penetapan PERDA						
26.	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2 Dok	2	100	
27.	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	15 Dok	15	100	
28.	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	6 Dok	6	100	
29.	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	5 Dok	5	100	
30.	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dok	0	0	Kegiatan sudah di drop
Pembahasan Kebijakan Anggaran		Tersedianya Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran				

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2023	Realisasi Th. 2023	Tingkat Capaian %	Keterangan
31.	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dok	1	100	
32.	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dok	1	100	
33.	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dok	1	100	
34.	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dok	1	100	
35.	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Semester	1 Dok	1	100	
36.	Pembahasan Pertanggung jawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dok	1	100	
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Tersedianya Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				
37.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Lap	12	100	
38.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Lap	12	100	
39.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Lap	12	100	
40.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Lap	12	100	
41.	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Laporan Keuangan oleh Bdan Pemeriksa Keuangan	1 Dok	1	100	
42.	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dok	1	100	
43.	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dok	1	100	

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2023	Realisasi Th. 2023	Tingkat Capaian %	Keterangan
Peningkatan Kapasitas DPRD		Tersedianya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD				
44.	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	13 Dokumen	13	100	
45.	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah orang dalam kelompok pakar	204 org/bln	204	100	
46.	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	54 Org	54	100	
47.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	51 Dok	55	107.84	
48.	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	3 Dok	3	100	
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Tersedianya Laporan dan Dokumen Hasil Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				
49.	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja Dalam Daerah	3 Lap	3	100	
50.	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	3 Dok	2	66.67	
51.	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dok	3	100	
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Terlaksananya Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD				
52.	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Pengawasan Kode Etik DPRD	12 Lap	12	100	
Fasilitasi Tugas DPRD		Tersedianya Laporan dan Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas DPRD				
53.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dok	4	33.33	Dari 12 kelompok hanya terlaksana 4 kelompok PDLN
54.	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Kinerja DPRD yang disusun	2 Lap	2	100	
55.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	3 Dok	3	100	
56.	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	36 Dok	36	100	

Sumber : Siencang.bekasikota.go.id/monev2023

Berdasarkan Tabel 2.3 diatas, terdapat beberapa Sub. Kegiatan yang capaian target kinerjanya dibawah 100% sebagai berikut :

1. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan capaian target sebesar 75% dikarenakan pencairan situasional menyesuaikan kebutuhan, terhadap Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik
2. Sub. Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD dengan capaian target sebesar 50% dikarenakan 25 Dewan melakukan MCU secara mandiri sebagai syarat mengikuti Caleg 2024 dari target 50 orang Dewan yang akan melaksanakan MCU.
3. Sub. Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD dengan capaian target sebesar 0%. Sub Kegiatan sudah di drop karena tidak adanya kegiatan penyusunan Tata Tertib DPRD di tahun 2023, namun target capaian belum disesuaikan dalam RKA Perubahan, sehingga berpengaruh terhadap capaian kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan.
4. Sub. Kegiatan Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD dengan capaian target sebesar 66.67% karena kegiatan hanya dilaksanakan sebanyak 2 (dua) dokumen dari target 3 dokumen.
5. Sub. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD dengan capaian target sebesar 33.33%, disebabkan lamanya proses perijinan dan administrasi akibat pembatalan perjalanan dinas (*reschedule*).

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah, Triwulan IV Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023, terdapat beberapa Sub. Kegiatan yang capaian target kinerjanya dibawah 100%. Rata-rata persentase capaian kinerja kegiatan sebesar 83.33% dengan predikat **“Tinggi”**, rata-rata persentase capaian kinerja program sebesar 93.80% dengan predikat **“Sangat Tinggi”**, sehingga rata-rata persentase capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program sebesar 95.23% dengan predikat **“Sangat Tinggi”**.

Adapun faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tersebut antara lain:

1. Belum optimalnya pengendalian, dan kurangnya Monitoring dan Evaluasi (Monev) perangkat daerah sebagai dasar untuk perbaikan

kinerja dan dalam rangka pencapaian target kinerja yang berkontribusi dalam pencapaian target IKU.

2. Belum memudahinya Sumber Daya Manusia (SDM) yang melakukan perencanaan dan pelaporan, yang belum mampu menyusun indikator kinerja yang tepat syarat, sehingga menyulitkan proses pelaporan dan monev.

Indikasi :

- a. Masih terbatasnya pengetahuan dan pemahaman dalam hal perencanaan, contohnya: target kegiatan dapat dievaluasi dan disesuaikan pada saat Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dalam rangka pencapaian target kinerja dan pencapaian target IKU.
 - b. Pelaporan pada Aplikasi Simpelbang dan Aplikasi Monev yang belum tepat syarat dan tepat waktu.
3. Rendahnya kualitas data dan informasi, diakibatkan pengumpulan data masukan capaian/realisasi dari Perangkat Daerah terhambat/ beberapa terlambat sehingga waktu pengumpulan dan pengolahan data serta perumusan analisis dan rekomendasi menjadi lebih singkat.

Kebijakan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pengendalian, dan Monitoring dan Evaluasi (Monev) mulai dari level bagian sampai dengan level perangkat daerah, sebagai dasar untuk perbaikan kinerja dan dalam rangka pencapaian target kinerja yang berkontribusi dalam pencapaian target IKU.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, bulanan, dan triwulanan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai IKU;
3. Meningkatkan pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang melakukan perencanaan dan pelaporan mulai dari level bagian sampai dengan level perangkat daerah, untuk mampu menyusun indikator kinerja yang tepat syarat, sehingga memahami tata cara proses pelaporan dan monev, sehingga kinerja dapat diukur.

4. Meningkatkan kualitas data dan informasi, sehingga diperoleh data yang tepat dan akurat, sebagai dasar pengolahan data, perumusan analisis, dan rekomendasi.

2.2. Analisis Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Analisis kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi berupa kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya. Pada Tahun 2023, Sekretariat DPRD Kota Bekasi memiliki 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti tampak pada Tabel 2.4 di bawah :

Tabel 2.4
EVALUASI KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI
TAHUN 2023 TERHADAP INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Prosentase Fasilitas Raperda yang difinalisasikan menjadi Perda tepat waktu	75.20%	80%	106.38%
		Prosentase Fasilitas Pengesahan Anggaran tepat waktu	75.20%	100%	132.98%
		Prosentase Fasilitas Pembahasan LPKJ Kepala Daerah tepat waktu	75.20%	100%	132.98%
2.	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel	Nilai AKIP Perangkat Daerah	77.60	63.38	81.67%

Sumber : Data diolah Bagian Program dan Perencanaan, Tahun 2023

1. Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu

Perhitungan IKU untuk “Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu ”dilakukan melalui: Jumlah Raperda yang diusulkan baik itu dari OPD teknis terkait maupun dari aspirasi DPRD di bagi Perda yang disahkan tepat waktu di kali 100% dan sudah di Paripurnakan. Dan di buat laporannya dalam bentuk Daftar Raperda yang sudah di Paripurnakan.

Berdasarkan pada visi dan misi Kepala Daerah Kota Bekasi Terpilih 2018-2023, maka Sekretariat DPRD Kota Bekasi akan mendukung pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih terutama di Misi Pertama yaitu: **“Meningkatkan Kapasitas Tata**

Kelola Pemerintahan yang baik” sebagai bentuk tanggung jawab mendukung pencapaian Visi dan pelaksanaan Misi Kepala Daerah Kota Bekasi.

Tabel 2.5
Capaian IKU Prosentase Raperda yang difinalisasikan menjadi Perda tepat waktu

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2022
			Target	Realisasi		
1	Prosentase Raperda yang difinalisasikan menjadi Perda tepat waktu	Persen	75,20%	80%	106,38%	99,86 %

Sumber : Data Olahan Bagian Program dan Keuangan, Sekretariat DPRD Kota Bekasi, 2023

Target penyelesaian Raperda TA 2023 yang difinalisasikan menjadi Perda tepat waktu sejumlah 16 Perda dari 20 Raperda yang tersusun dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2023. Signifikansi kenaikan Capaian Kinerja Tahun 2023 sebesar 106,38% yang ditahun sebelumnya mencapai 99,86% merupakan capaian yang dianggap sangat baik mengingat keseriusan Anggota DPRD Kota Bekasi dalam pembahasan dan pengkajian Raperda secara komprehensif dan maraton, baik Raperda inisiatif DPRD maupun inisiatif Pemerintah Kota Bekasi.

Faktor lain adalah, bahwa dengan dukungan anggaran yang mengacu pada Rencana Kerja DPRD Tahun 2023 serta hasil evaluasi kinerja DPRD tahun 2023, dirasa perlu untuk mendorong komitmen terhadap penyelesaian Raperda yang tersusun dalam Propemperda Tahun 2023.

Perlu diketahui, hanya ada 2 Raperda belum selesai proses finalisasi dan 2 Raperda lainnya telah diluncurkan kembali serta disusun pada Propemperda tahun 2024, sebagai komitmen dalam rangka penyelesaian seluruh Raperda yang dibutuhkan oleh Kota Bekasi.

Rumusan dalam menghitung capaian tersebut sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perda yang disahkan}}{\text{Raperda yang diusulkan}} \times 100\%$$

Target Penyelesaian : 20 Judul Raperda

Realisasi : 16 Judul Raperda

$$\text{Perhitungan : } \frac{16}{20} \times 100\% = 80\%$$

Realisasi penyelesaian melampaui dari target sejumlah 4,8% dengan tingkat capaian sebesar 106,38%.

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tahun 2023 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Adanya perubahan pola pikir (*mindset*) dari DPRD Kota Bekasi representasi pelaksanaan Pendalaman Tugas DPRD yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Bekasi sehingga meningkatnya pemahaman DPRD terhadap tugas dan fungsinya.
- b. Sinergitas yang baik antara DPRD Kota Bekasi dengan Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam memfasilitasi seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- c. Adanya dukungan anggaran terhadap Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang berbanding lurus dengan komitmen pengkajian dan pembahasan Raperda.

Sedangkan faktor yang menyebabkan tidak tercapainya pembahasan dan finalisasi seluruh Raperda yang terdapat dalam Propemperda tahun 2023 adalah dikarenakan padatnya jadwal kegiatan Anggota DPRD yang berdampak pada terbatasnya waktu pembahasan, serta finalisasi Raperda terhambat sehingga tidak bisa membentuk pansus penugasan baru.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai target kinerja untuk indikator Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu di masa yang akan mendatang adalah:

- a. Penjadwalan dan pembahasan secara tepat waktu.
- b. Sinergitas yang baik antara DPRD Kota Bekasi, Sekretariat DPRD Kota Bekasi, dan Pemerintah Kota dalam mengawal proses pembentukan Raperda menjadi Perda.
- c. Dukungan Anggaran terhadap Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

2. Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu

Perhitungan IKU untuk “Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu” dilakukan sesuai dengan Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dimana Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi, paling lambat akhir November.

Tabel 2.6
Capaian IKU Prosentase Pengesahan Anggaran Tepat Waktu

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2022
			Target	Realisasi		
2	Prosentase Pengesahan Anggaran	Persen	75,20 %	100%	132.98 %	100%

Sumber : Data Olahan Bagian Program dan Keuangan, Sekretariat DPRD Kota Bekasi, 2023

Target penyelesaian pengesahan anggaran TA 2023 tepat waktu sejumlah 100%.

Rumusan dalam menghitung capaian tersebut sebagai berikut:

$$\frac{\text{Pengesahan APBD}}{\text{Pengesahan APBD dan LP2APBD}} \times 100\%$$

Target Penyelesaian : 2 Raperda

Realisasi : 2 Raperda

$$\text{Perhitungan : } \frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$$

Realisasi penyelesaian sesuai dengan target dengan tingkat capaian sebesar 100%.

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tahun 2023 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

- a. Adanya komitmen DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan;
- b. Adanya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait penyampaian, pembahasan dan pengesahan Raperda yang ada.
- c. Adanya dukungan dana terhadap Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

3. Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu

Perhitungan IKU untuk “Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu” dilakukan sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Tabel 2.7
Capaian IKU Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2022
			Target	Realisasi		
3	Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tepat Waktu	Persen	75,20 %	100%	132.98 %	100%

Sumber : Data Olahan Bagian Program dan Keuangan, Sekretariat DPRD Kota Bekasi, 2023

Target penyelesaian pembahasan LKPJ Kepala Daerah TA 2023 tepat waktu sejumlah 100%.

Rumusan dalam menghitung capaian tersebut sebagai berikut:

Pembahasan LKPJ	x 100%
Rekomendasi LKPJ oleh DPRD diserahkan tepat waktu	

Target Penyelesaian : 1 LKPJ

Realisasi : 1 Dokumen Rekomendasi LKPJ

$$\text{Perhitungan : } \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Realisasi penyelesaian sesuai dengan target dengan tingkat capaian sebesar 100%

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tahun 2021 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

- a. Adanya komitmen DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Adanya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait penyampaian, pembahasan dan pengesahan Raperda yang ada.
- c. Adanya dukungan dana terhadap Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

4. Nilai AKIP Perangkat Daerah

Analisis akuntabilitas kinerja meliputi keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik. Dalam analisis ini perlu pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan akurat dan bila memungkinkan dilakukan pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya (LAN, 2003:26).

Perhitungan nilai AKIP sebagai berikut: Nilai Komponen Perencanaan Kinerja + Nilai Komponen Pengukuran Kinerja + Nilai Komponen Pelaporan Kinerja _ Nilai Komponen Evaluasi Internal + Nilai Komponen Capaian Kinerja Target.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023, nilai AKIP Sekretariat DPRD adalah 63.38%, dengan kategori **“B”**, Seperti tampak pada Tabel 2.8 di bawah.

Tabel 2.8
PENILAIAN SAKIP

No.	Komponen Yang Dinilai	2023	
		Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	20.86
b.	Pengukuran Kinerja	30	20.99
c.	Pelaporan Kinerja	15	10.34
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	11.19
Nilai Hasil Evaluasi		100	63.38
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 Sekretariat DPRD

Realisasi nilai AKIP pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi tidak mencapai target, yaitu realisasi sebesar 63,38% dari target 77,6%, sehingga capaian kinerja tahun 2023 sebesar 81,67%, seperti tampak pada Tabel 2.9 di bawah.

Tabel 2.9
PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN
CAPAIAN INDIKATOR SASARAN

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	77,5%	70,08%	90,42%	77,6%	63,38%	81.67%

Sumber : Data Olahan Bagian Program dan Keuangan, Sekretariat DPRD Kota Bekasi, 2023

Jika dibandingkan nilai AKIP tahun 2023 dengan nilai AKIP tahun 2022, maka terjadi penurunan nilai AKIP. Capaian Kinerja untuk indikator belum tercapai disebabkan karena: a) Belum selarasnya antara dokumen perencanaan jangka menengah dengan perencanaan jangka pendek; b) Masih terdapat ketidakselarasan antara dokumen perencanaan jangka menengah dengan perencanaan jangka pendek; c) Belum melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja eselon II (Kepala Badan), eselon III (Sekretaris, Kepala Bidang), eselon IV (Kepala Sub Bagian), Sub coordinator, Jabatan Fungsional dan pelaksana (staf); d) Pemberian *reward* dan *punishment* belum berdasarkan

capaian kinerja individu; dan e) Pemanfaatan hasil evaluasi kinerja dalam penyusunan perencanaan belum optimal.

Adapun upaya-upaya yang perlu dilakukan ke depan untuk meningkatkan capaian nilai AKIP Sekretariat DPRD Kota Bekasi antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan kinerja agar sesuai standar dengan: 1) Menyelaraskan substansi seluruh dokumen perencanaan, baik antar dokumen perencanaan maupun substansi dari antar Bab dalam dokumen perencanaan; 2) Memformalkan dokumen perencanaan dan pedoman perencanaan kinerja agar legal dan dapat dijadikan pedoman dalam melakukan perencanaan dan pengukuran kinerja; 3) Meningkatkan kualitas substansi pada dokumen perencanaan; dan 4) Menyusun Rencana Akasi, Indikator Kinerja Individu (IKI), Rencana Kerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2023 sehingga target kinerja dapat dicapai.
- b. Melakukan pengukuran kinerja terhadap capaian kinerja untuk mewujudkan capaian kinerja yang efektif, efisien, dan dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, yaitu: 1) Melaksanakan pembahasan evaluasi internal triwulanan agar dapat menentukan tindak lanjut atas target sasaran, outcome program, dan output; 2) Memanfaatkan pengukuran kinerja yang telah dilakukan dalam penempatan/penghapusan jabatan dan penyesuaian organisasi; 3) Meningkatkan kepedulian dan pemahaman pegawai dalam hal pengukuran kinerjanya agar dapat mendukung tujuan dan sasaran dinas.
- c. Meningkatkan kualitas penyusunan Laporan Kinerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014, dan memanfaatkan Laporan Kinerja tersebut untuk perbaikan perencanaan kinerja.
- d. Melakukan evaluasi internal secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai sehingga dapat meningkatkan implementasi SAKIP, selain itu memperbaiki dan memformalkan SOP Penyusunan Evaluasi Capaian Kinerja

agar legal dan dapat dijadikan pedoman dalam melakukan evaluasi kinerja internal.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Mengacu pada tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kota Bekasi memiliki peran dalam memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di DPRD. Kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD selaku entitas penting dalam pembangunan daerah juga ditentukan oleh kenyamanan dan kelancaran fasilitas terhadap pelaksanaan tiap-tiap kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD didalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024-2026, Sekretariat DPRD Kota Bekasi menghadapi permasalahan sebagai berikut:

a. Masih lemahnya pemahaman Anggota DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka mewujudkan amanah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 149 yang menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) fungsi dari DPRD Kabupaten/Kota yaitu fungsi pengawasan serta dalam rangka optimalisasi kinerja Anggota DPRD terpilih di tahun 2025, dipandang perlu terus dilakukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan semangat pengabdian Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terpilih di Kota Bekasi.

Hal ini dimaksudkan untuk mengatasi lemahnya pemahaman Anggota DPRD terpilih terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya yang disebabkan oleh beragamnya latar belakang dari Anggota DPRD tersebut yang bisa menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja dari Anggota DPRD diantaranya adalah Faktor Individual (latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh Anggota DPRD yang

multidisiplin), Faktor Psikologi (berkomunikasi dan bekerjasama sebagai wujud perilaku kerja yang baik), serta Faktor Organisasi (Pembagian tugas antar Anggota DPRD yang baik dan merata sebagai wujud komitmen kerja).

b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Profesional

Didalam menjalankan perannya, Sekretariat DPRD menghadapi tuntutan untuk melaksanakan tugas yang cepat, tepat dan memuaskan dari segenap anggota DPRD sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas DPRD. Disisi lain, SDM yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD saat ini masih belum mencukupi. Kebutuhan Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugasnya banyak membutuhkan SDM yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informatika, bidang ekonomi dengan disiplin ilmu akuntansi, manajemen dan ilmu ekonomi, manajemen strategis dan perencanaan, dan bidang hukum.

Keterbatasan sarana dan pra sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) kecepatan internet. Kapasitas internet di Sekretariat DPRD yang masih minim, menjadi keluhan anggota DPRD Kota Bekasi. Selain jaringan internet, sarana pendukung lainnya yang masih kurang adalah computer. Masih terdapat beberapa aparatur Sekretariat DPRD yang menggunakan computer dengan spesifikasi rendah, sehingga kurang mendukung pelaksanaan kegiatan.

c. Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) DPRD yang belum optimal

Jadwal Agenda DPRD sebelumnya sudah ditetapkan dan dituangkan kedalam Berita Acara, namun implementasinya Agenda DPRD tersebut tidak dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah disepakati. Hal ini berdampak pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan yang dijadwalkan.

d. Kurang optimalnya dalam melaksanakan program dan kegiatan

Seringnya terjadi perubahan kebijakan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta sering berubahnya kebijakan Pemerintah Pusat mempengaruhi terhadap kinerja Sekretariat DPRD.

Padatnya jadwal kegiatan DPRD mengakibatkan jadwal kegiatan yang sudah disusun dan disepakati adakalanya tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal. Hal ini disebabkan karena banyaknya kegiatan di luar dari kegiatan Sekretariat DPRD, sehingga kegiatan yang sudah dijadwalkan tidak terlaksana karena berbenturan waktu dengan kegiatan lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, isu penting yang dihadapi Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain:

- a. Peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan semangat pengabdian Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Peningkatan kapasitas SDM Sekretariat DPRD. Kompetensi SDM Sekretariat DPRD belum memenuhi dalam mendukung semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel dibidangnya.
- d. Peningkatan sarana dan prasarana ICT (Information Communication Technology) untuk mendukung aksesibilitas informasi.
- e. Peningkatan kualitas mekanisma perencanaan perangkat daerah.

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) DPRD yang berkualitas dipengaruhi oleh mekanisma dalam perumusan perencanaan Renja dan implementasinya. Diperlukan perencanaan yang baik serta komitmen untuk melaksanakan agenda yang sudah disusun dan disepakati.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses review ini dilakukan untuk memastikan apakah kebutuhan program/kegiatan Perangkat Daerah sudah terakomodir dalam Rancangan Awal RKPD atau belum. Dengan demikian, usulan dapat diajukan kembali pada tahapan Rancangan RKPD.

Hasil review Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 terkait Sekretariat DPRD Kota Bekasi adalah seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 telah sesuai dengan kebutuhan Sekretariat DPRD untuk Tahun Anggaran 2025, sebagaimana disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.10
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Bekasi Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Kota Bekasi

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					No.	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN /KOTA					102.886.431.754		PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN /KOTA	IKP.1				104.793.028.704	
								Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Optimalisasi Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja and Keuangan				
							01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bekasi Timur	12 Dok	40.000.000	
							06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD	Bekasi Timur	3 Lap	40.000.000	
								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Optimalisasi Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sekretariat DPRD				
							01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bekasi Timur	2086 orang/bulan	18.729.339.000	

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025						No.	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							05	Koordinasi dan Penyusunan Lapran Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bekasi Timur	2 Lap	40.000.000	
							07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanam/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanam/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanam/ Semesteran SKPD	Bekasi Timur	15 Lap	24.000.000	
								Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Optimalisasi Disiplin Aparatur Sekretariat DPRD				
							02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Bekasi Timur	0	0	
								Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD				
							09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Bekasi Timur	52 Orang	379.170.000	

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025						No.	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bekasi Timur	48 Orang	572.000.000	
								Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya Kegiatan pada Administrasi Umum Perangkat Daerah				
							01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bekasi Timur	1 Paket	150.000.000	
							04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bekasi Timur	4 Paket	2.937.763.000	
							05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Bekasi Timur	3 Paket	459.116.562	
							06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Bekasi Timur	4 Dok	580.000.000	
							08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bekasi Timur	12 Lap	1.552.450.000	
							09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bekasi Timur	12 Lap	1.000.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025						No.	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
								Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD				
							06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Bekasi Timur	220 Unit	2.000.000.000	
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat DPRD				
							01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bekasi Timur	566 Laporan	25.000.000	
							02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Bekasi Timur	36 Lap	1.200.000.000	
							04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Bekasi Timur	12 Lap	124.283.040	
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD				

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025						No.	Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Bekasi Timur	1 Unit	120.000.000	
							02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bekasi Timur	33 Unit	510.000.000	
							05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Bekasi Timur	100 Unit	100.000.000	
							06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bekasi Timur	177 Unit	832.000.000	
							09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	Bekasi Timur	4 Unit	7.500.000.000	
								Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Optimalisasi Kegiatan dan Layanan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD				
							01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Bekasi Timur	650 org/bln	63.942.907.102	
							02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Bekasi Timur	6 Paket	770.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025						No.	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Bekasi Timur	50 Orang	165.000.000	
								Layanan Administrasi DPRD		Optimalisasi Kegiatan dan Layanan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD				
							03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Jumlah laporan hasil fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Bekasi Timur	12 Lap	1.000.000.000	
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					126.481.299.276		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					132.384.213.428	
								Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Persentase Terfasilitasinya Proses Penyusunan dan Penetapan Perda				
							01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Peraturan Daerah	Bekasi Timur	2 Dok	1.700.000.000	
							02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Bekasi Timur	10 Dok	10.504.205.000	
							03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	Bekasi Timur	10 Dok	5.000.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025						No.	Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi	Bekasi Timur	7 Dok	7.500.000.000	
							05	Penyusunan Tata Tertib DPRD		Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD	Bekasi Timur	1 Dok	750.000.000	
								Pembahasan Kebijakan Anggaran		Persentase Terpenuhinya Proses Penyusunan dan Penetapan APBD dan LAPBD				
							01	Pembahasan KUA dan PPAS		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Bekasi Timur	1 Dok	2.000.000.000	
							02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Bekasi Timur	1 Dok	1.500.000.000	
							03	Pembahasan APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Bekasi Timur	1 Dok	735.000.000	
							04	Pembahasan APBD Perubahan		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Bekasi Timur	1 Dok	1.116.420.000	
							05	Pembahasan Laporan Semester		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Bekasi Timur	1 Dok	735.000.000	
							06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		Jumlah dokumen hasil pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Bekasi Timur	1 Dok	1.500.000.000	
								Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Persentase Terfasilitasinya Kegiatan DPRD				

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025						No.	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Bekasi Timur	12 Lap	5.311.670.264	
							02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Bekasi Timur	12 Lap	5.311.670.264	
							03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Bekasi Timur	12 Lap	5.311.670.264	
							04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Bekasi Timur	12 Lap	5.311.670.264	
							05	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Bekasi Timur	1 Dok	1.700.000.000	
							07	Pengawasan Penggunaan Anggaran		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Bekasi Timur	1 Dok	9.500.000.000	
							08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan	Bekasi Timur	1 Dok	2.580.833.872	

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025						No.	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
										Pertanggungjawaban Kepala Daerah				
								Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase Terasilitasinya Kegiatan DPRD				
							02	Pendalaman Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Bekasi Timur	6 Dok	6.820.000.000	
							04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Bekasi Timur	204 Orang	2.341.612.000	
							05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Bekasi Timur	54 Orang	756.000.000	
							06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Bekasi Timur	12 Dok	12.000.000.000	
							07	Penyusunan Program Kerja DPRD		Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Bekasi Timur	3 Dok	2.000.000.000	
								Pnyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Persentase Terasilitasinya Kegiatan DPRD				
							01	Kunjungan Kerja dalam Daerah		Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Bekasi Timur	3 Lap	284.182.500	
							02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Bekasi Timur	3 Dok	1.225.000.000	
							03	Pelaksanaan Reses		Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Bekasi Timur	3 Dok	11.716.825.000	

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025						No.	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
								Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Persentase Terasilinasinya Kegiatan DPRD				
							02	Pengawasan Kode Etik DPRD		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Bekasi Timur	12 Lap	3.089.068.000	
								Fasilitasi Tugas DPRD		Persentase Terasilinasinya Kegiatan DPRD				
							01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Bekasi Timur	12 Dok	8.245.820.000	
							02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		Jumlah Laporan Kinerja DPRD yang Disusun	Bekasi Timur	1 Lap	1.500.000.000	
							03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Bekasi Timur	3 Dok	13.037.566.000	
							04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		Jumlah Dokumen Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Bekasi Timur	12 Dok	1.300.000.000	
TOTAL						229.367.731.030	TOTAL					237.177.242.132		

Keterangan:

- *) Terdapat perbedaan target dan pagu antara Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dan RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dikarenakan perhitungan target dan pagu dilakukan setelah RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 ditetapkan.
- ***) Terdapat perbedaan target dan pagu antara Renja 2025 dan Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024-2026, terkait Perpres RI No 53 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Perpres RI No 33 Tahun 2020 Tentang Standar harga Satuan Regional.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam pelaksanaan Musrenbang disampaikan usulan kegiatan dari masyarakat yang ditujukan ke Perangkat Daerah Kota Bekasi. Namun dalam Renja Tahun 2025 belum dilaksanakan musrenbang, dengan demikian belum dapat disajikan usulan kegiatan dari masyarakat untuk tahun 2025 yang ditujukan ke Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Tabel 2.11
Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat DPRD

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Nasional dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh caapaian pembangunan seluruh provinsi di Indonesia. Untuk itu perlu dibangun sistem yang terintegrasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah di tingkat provinsi, yang selanjutnya didukung dan dipedomani oleh kabupaten/kota.

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2025 mengacu dan memperhatikan : (1) RTRW Kota Bekasi 2009-2023; (2) Sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2025 dan (5) Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan pembangunan Tahun 2025.

Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2025 diarahkan untuk menjabarkan dan melaksanakan sasaran setiap tujuan pembangunan Kota Bekasi periode Tahun 2024-2026. Pencapaian target sasaran pembangunan diindikasikan dengan sejumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Mengacu kepada RPJMN 2024-2024, pembangunan nasional dilakukan dengan memperhatikan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang tetap dipertahankan menjadi Prioritas Nasional (PN) pada RKP 2025. Adapun Tema Pembangunan Nasional Tahun 2024 yaitu : **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** dengan didukung oleh 7 (tujuh) Prioritas Nasional sebagai berikut: 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; 3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; 4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; 6) Membangun lingkungan

hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; 7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Sehingga sasaran pembangunan tahun 2025 adalah mengupayakan pencapaian target-target pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 dan mendorong terciptanya pondasi yang kokoh bagi pembangunan periode 2025-2029 melalui:

- 1) Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan, dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;
- 2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif, dengan indikator (1) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2025 ditetapkan 8 (delapan) arah kebijakan pembangunan yaitu:

- 1) Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- 2) Peningkatan kualitas dan penguatan riset terapan;
- 3) Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
- 4) Penguatan daya saing usaha;
- 5) Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
- 6) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas; dan
- 7) Percepatan pembangunan ibu kota nusantara.

Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

Periode perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa barat Tahun 2018-2023 telah berakhir seiring dengan selesainya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Sesuai engan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, Provinsi Jawa Barat menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bekasi

Tujuan merupakan kondisi yang akan dicapai pada akhir suatu periode pembangunan. Jika dalam RPJMD pencapaian tujuan diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, maka da;a, RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 ini

diukur dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yang dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 didefinisikan sebagai rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Pencapaian tujuan dan sasaran dievaluasi dengan menggunakan seperangkat indikator pembangunan yang relevan. Indikator-indikator tersebut ditetapkan dengan maksud agar proses dan pelaksanaan program prioritas dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. Perumusan tujuan dan sasaran beserta indikatornya adalah tahapan strategis yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bekasi sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang dijelaskan dalam Gambar 3.1 berikut:



Gambar 3.1 Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bekasi 2024-2026

Tujuan dan sasaran diukur keberhasilannya melalui capaian indikator kinerja atau indikator pembangunan. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja yang dalam hal ini adalah sasaran dan tujuan dalam bentuk hasil (outcome), dampak(impact). Indikator kinerja di level hasil (outcome) yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu sasaran didefinisikan sebagai keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu atau

dipertahankan pada penerima mandat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Sedangkan indikator kinerja di level dampak (impact) yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan didefinisikan sebagai kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program. Cascading kinerja dari masing-masing indikator tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Tujuan Pembangunan Kota Bekasi yang **Pertama** adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel. Perwujudan tujuan ini ditunjang oleh dua sasaran yaitu (1) Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah serta (2) Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah. Masing-masing tujuan dan sasaran memiliki indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan sekaligus acuan ketercapaian. Indikator kinerja masing-masing adalah sebagai berikut.

		INDIKATOR KINERJA
Tujuan 1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran 1.1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik
Sasaran 1.2	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
		Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (Opini BPK terhadap Laporan Keuangan)
		Presentase Peningkatan PAD

Tujuan Pembangunan Kota Bekasi yang **Kedua** yaitu Terwujudnya Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas secara Berkeadilan. Tujuan tersebut didukung pemenuhannya oleh lima sasaran, yaitu (1) Meningkatnya Masyarakat yang Berpengetahuan Tinggi, (2) Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat, (3) Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga dan Pembangunan Responsif Gender, dan (4) Meningkatnya Tenaga Kerja yang Adaptif dan Kesejahteraan Masyarakat Kota. Masing-masing tujuan dan sasaran memiliki indikator kinerja sebagai

ukuran keberhasilan sekaligus acuan ketercapaian. Indikator kinerja masing-masing adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA		
Tujuan 2	Terwujudnya Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas Secara Berkeadilan	Indeks Pembangunan Manusia
Sasaran 2.1	Meningkatnya Masyarakat yang Berpengetahuan Tinggi	Indeks Pendidikan
Sasaran 2.2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan
		Gini Ratio
Sasaran 2.3	Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga dan Pembangunan Responsif Gender	Indeks Pembangunan Keluarga Indeks Pembangunan Gender
Sasaran 2.4	Meningkatnya Tenaga Kerja yang Adaptif dan Kesejahteraan Masyarakat Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka Angka Kemiskinan

Terwujudnya Ketersediaan Infrastruktur Kota dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan merupakan Tujuan Pembangunan Kota Bekasi yang **Ketiga**. Tujuan ini didukung oleh satu sasaran yaitu Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berwawasan Lingkungan. Masing-masing tujuan dan sasaran memiliki indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan sekaligus acuan ketercapaian. Indikator kinerja masing-masing adalah sebagai berikut.

INDIKATOR KINERJA		
Tujuan 3	Terwujudnya Ketersediaan Infrastruktur Kota dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Indeks Infrastruktur Wilayah
Sasaran 3.1	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berwawasan Lingkungan	Indeks Infrastruktur Ke-PU-an Indeks Sarana Prasarana Perhubungan Indeks Perumahan Permukiman Pertanahan Indeks Penataan Ruang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Sementara tujuan Pembangunan Kota Bekasi **Keempat** adalah Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman. Tujuan tersebut didukung pemenuhannya oleh dua sasaran, yaitu (1) Meningkatkan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang Didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat dan (2) Meningkatkan Upaya dan Kesiapsiagaan Dalam Mengurangi Risiko Bencana.

Masing-masing tujuan dan sasaran memiliki indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan sekaligus acuan ketercapaian. Indikator kinerja masing-masing adalah sebagai berikut.

INDIKATOR KINERJA		
Tujuan 4	Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Umum
Sasaran 4.1	Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang Didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Umum
		Prosentase Kerjasama Antar Kelompok Sara
		Indeks Risiko Bencana
Sasaran 4.2	Meningkatnya Upaya dan Kesiapsiagaan Dalam Mengurangi Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana
		Indeks Penanggulangan Kebakaran

Sedangkan tujuan Pembangunan Kota Bekasi yang **Kelima**, adalah Terwujudnya Ketahanan Struktur Perekonomian Masyarakat Kota. Untuk tujuan yang terakhir ini ditetapkan dua sasaran yang akan mendukung pencapaiannya yaitu (1) Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan, Jasa, dan Industri serta Iklim Usaha Berbasis Pengalaman (Kreatif) dan Investasi dan (2) Meningkatnya Daya Beli Masyarakat. Masing-masing tujuan dan sasaran memiliki indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan sekaligus acuan ketercapaian. Indikator kinerja masing-masing adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA		
Tujuan 5	Terwujudnya Ketahanan Struktur Perekonomian Masyarakat Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi
Sasaran 5.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan, Jasa, dan Industri serta Iklim Usaha Berbasis Pengalaman (Kreatif) dan Investasi	Persentase Peningkatan Nilai Sektor Perdagangan dan Jasa
		Persentase Peningkatan Nilai Sektor Industri
		Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi
Sasaran 5.2	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Peningkatan Pengeluaran Perkapita
		Laju Inflasi

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2025

Arah kebijakan pembangunan disusun untuk memberikan arah dan memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan selama rentang waktu Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dari 2024 sampai dengan 2026. Pada saat yang sama arah kebijakan juga dirancang untuk menjadi payung

bagi pencapaian prioritas pembangunan dalam RPD Kota Bekasi 2024-2026 pada aspek tata kelola pemerintahan, pembangunan manusia, keamanan dan ketertiban kota, pembangunan infrastruktur, dan ketahanan ekonomi.

Untuk mendukung pemenuhan tujuan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel arah kebijakan RPD 2024-2026 adalah Penguatan fungsi pemerintah melalui reformasi birokrasi dan transformasi layanan berbasis digital.

Dalam rangka mendorong pencapaian tujuan Terwujudnya Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas Secara Berkeadilan terdapat dua arah kebijakan pada RPD 2024-2026 yaitu Penguatan kualitas manusia melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan yang inklusif dan merata dan Penguatan ketahanan keluarga dan mendorong kewirausahaan secara inklusif.

Sementara untuk mendukung pemenuhan tujuan Terwujudnya Ketersediaan Infrastruktur Kota dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan dan tujuan Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib, arah kebijakan RPD 2024-2026 adalah Peningkatan ketahanan kota melalui penguatan kualitas pelayanan dasar infrastruktur dan lingkungan.

Sedangkan untuk mendukung pemenuhan tujuan Terwujudnya Ketahanan Struktur Perekonomian Masyarakat Kota arah kebijakan RPD 2024-2026 adalah Peningkatan kekuatan dan kemantapan perekonomian kota melalui kemudahan berusaha di sektor jasa, perdagangan, industri dan usaha kecil alternatif berbasis ekonomi kerakyatan.

Secara lebih detail, strategi dan arah kebijakan pembangunan dalam RKPD Kota Bekasi tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT /OUTCOME)	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi		1. Penguatan fungsi pemerintah melalui reformasi birokrasi dan transformasi layanan berbasis digital
1.1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	1. Meningkatkan kompetensi SDM aparatur pemerintah di bidang layanan masyarakat	
			2. Menerapkan teknologi/transformasi digital dalam menunjang peningkatan kualitas layanan masyarakat	
1.2	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	1. Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan berbasis bukti dan data yang saling terintegrasi	
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	2. Penguatan, Fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kerja sama antar daerah serta kolaborasi	
		Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (Opini BPK terhadap Laporan Keuangan)	3. Meningkatkan pengendalian proses pembangunan dan percepatan penyelesaian rekomendasi hasil audit	
		Presentase Peningkatan PAD	4. Meningkatkan pemetaan, pengembangan kompetensi, penilaian evaluasi kinerja, kesejahteraan dan promosi aparatur berbasis sistem secara transparan.	
2	Terwujudnya Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas Secara Berkeadilan	Indeks Pembangunan Manusia		2. Penguatan kualitas manusia melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan yang inklusif dan merata
2.1	Meningkatnya Masyarakat yang Berpengetahuan Tinggi	Indeks Pendidikan	1. Meningkatkan aksesibilitas layanan pendidikan secara merata dan terjangkau seluruh kalangan	
			2. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi seluruh pihak guna peningkatan kualitas SDM siap berkompetisi	

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT /OUTCOME)	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
2.2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	1. Meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan masyarakat secara merata dan terjangkau seluruh masyarakat 2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penyediaan lingkungan sehat	
		Gini Ratio		
2.3	Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga dan Pembangunan Responsif Gender	Indeks Pembangunan Keluarga	1. Memfasilitasi pemberdayaan keluarga ber-Wirausaha dengan pendekatan kerjasama antar pihak pengandil	3. Penguatan ketahanan keluarga dan mendorong kewirausahaan secara inklusif
		Indeks Pembangunan Gender	1. Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan dan anak menjadi lebih berkualitas dan berdikari	
			2. Meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak atas hak dasar serta dari kekerasan dan ancaman keselamatan	
2.4	Meningkatnya Tenaga Kerja yang Adaptif dan Kesejahteraan Masyarakat Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka	Memperbanyak pelatihan kepada angkatan kerja lokal berbasis kolaborasi	
		Angka Kemiskinan	Menyelaraskan data pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dari berbagai sektor serta indikator penyebab	
3	Terwujudnya Ketersediaan Infrastruktur Kota dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Indeks Infrastruktur Wilayah		4. Peningkatan ketahanan kota melalui penguatan kualitas pelayanan dasar infrastruktur dan lingkungan.
3.1	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang	Indeks Infrastruktur Ke-PU-an	1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas jalan dan fasilitas pelengkap guna pemenuhan aksesibilitas dan mobilitas kendaraan	

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT /OUTCOME)	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Berwawasan Lingkungan	<p data-bbox="540 730 797 812">Indeks Sarana Prasarana Perhubungan</p> <p data-bbox="540 1141 797 1223">Indeks Perumahan Permukiman Pertanian</p> <p data-bbox="540 1614 797 1697">Indeks Penataan Ruang</p>	<p data-bbox="823 306 1141 520">2. Melakukan pengembangan jalur trotoar dan pedestrian sebagai fasilitas pejalan kaki yang layak dan nyaman serta guna aktivitas sosial masyarakat</p> <p data-bbox="823 525 1141 725">3. Melakukan pengurangan dampak banjir dengan merestorasi sistem drainase dan sungai melalui upaya kerjasama antar daerah dan pemerintah pusat</p> <p data-bbox="823 730 1141 904">1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan angkutan umum, halte, terminal dan fasilitas parkir serta perlengkapan jalan</p> <p data-bbox="823 909 1141 1108">2. Merumuskan dan memberikan rekomendasi kebijakan dalam upaya mendorong pengurangan penggunaan kendaraan pribadi dan beralih kepada penggunaan angkutan</p> <p data-bbox="823 1141 1141 1253">1. Meningkatkan akses dan kapasitas layanan air minum aman secara berkeadilan</p> <p data-bbox="823 1258 1141 1395">2. Meningkatkan akses dan kapasitas layanan pengolahan air limbah domestik dan kualitas layanan sanitasi</p> <p data-bbox="823 1400 1141 1599">3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas permukiman yang layak huni, bebas kumuh melalui peran partisipasi masyarakat dan berkelanjutan</p> <p data-bbox="823 1604 1141 1841">1. Meningkatkan kualitas dan evaluasi penataan serta pemanfaatan ruang dengan memperhatikan aspek lingkungan hijau, keberlanjutan dan ketahanan kota atas resiko bencana dan pencemaran</p> <p data-bbox="823 1846 1141 2045">2. Meningkatkan kualitas penataan kota dengan optimalisasi terwujudnya sistem pusat layanan yang berorientasi transit dan ketersediaan ruang publik kota</p>	

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT /OUTCOME)	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1. Meningkatkan upaya penurunan dan penanggulangan beban pencemaran lingkungan 2. Meningkatkan upaya penurunan dampak limbah non domestik dan limbah B3 melalui pendekatan partisipasi dan kolaborasi 3. Meningkatkan kapasitas ruang terbuka hijau kota dan optimalisasi penghijauan di kawasan perumahan permukiman guna upaya 4. Menigoptimalkan kapasitas dan kualitas pelayanan persampahan dengan mendorong kerjasama antar daerah, pihak swasta dan	
4	Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Umum		
4.1	Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang Didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Umum	1. Meningkatkan kapasitas pengetahuan masyarakat dalam hal upaya menjaga ketentraman dan ketertiban umum 2. Mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanganan tindak pelanggaran keamanan dan ketertiban melalui deteksi dini dan pengawasan berbasis digital	
		Prosentase Kerjasama Antar Kelompok Sara	Memfasilitasi ruang kerjasama dan komunikasi antar kelompok	
		Indeks Risiko Bencana		
4.2	Meningkatnya Upaya dan Kesiapsiagaan Dalam Mengurangi Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana serta kesiapsiagaan SDM 2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana	
		Indeks Penanggulangan Kebakaran		
5	Terwujudnya Ketahanan Struktur Perekonomian Masyarakat Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi		5. Peningkatan kekuatan dan kemantapan

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT /OUTCOME)	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
5.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan, Jasa, dan Industri serta Iklim Usaha Berbasis Pengalaman (Kreatif) dan Investasi	Persentase Peningkatan Nilai Sektor Perdagangan dan Jasa	1. Memberikan permodalan melalui dana bergulir atau pelatihan bagi koperasi dan UKM dengan mendorong peran organisasi non pemerintah 2. Membuka ruang, fasilitas, dan kemudahan pemasaran berbasis kolaborasi	perekonomian kota melalui kemudahan berusaha di sektor jasa, perdagangan, industri dan usaha kecil alternatif berbasis ekonomi kerakyatan
			3. Meningkatkan sektor kepariwisataan perkotaan serta pelestarian kesenian lokal dan situs bersejarah	
		Persentase Peningkatan Nilai Sektor Industri	Memfasilitasi sertifikasi bagi Industri Kecil dan Menengah	
		Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	Mengembangkan promosi penanaman modal	
5.2	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Peningkatan Pengeluaran Perkapita	Memberdayakan masyarakat melalui pengembangan sektor-sektor alternatif	
		Laju Inflasi	Menjaga stabilitas harga komoditas melalui intervensi di sektor distribusi dan upaya kemandirian pangan masyarakat	

Sumber : Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun. Tujuan merupakan target organisasi, sehingga pencapaiannya dapat diukur berdasarkan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah ke suatu titik terang pencapaian hasil.

Tujuan pada Renja ini adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2025. Tujuan merupakan target organisasi, sehingga pencapaiannya dapat diukur berdasarkan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Dengan adanya pernyataan tujuan yang ditetapkan, maka akan jelas bagi organisasi arah yang akan dicapai dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Sesuai dengan tugas pokoknya, Sekretariat DPRD mendukung pencapaian pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026, yaitu “Terwujudnya Tata

Kelola Perencanaan Pembangunan dan Keuangan yang Sehat, Tranparan dan Akuntabel”.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah tersebut, maka Sekretariat DPRD merumuskan Tujuan sebagai berikut.

Tujuan	: Meningkatkan Fasilitasi Kegiatan DPRD dalam pelaksanaan fungsi Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan.
Indikator Tujuan	: Prosentase Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan DPRD

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, dirumuskan sasaran yaitu rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil kinerja Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran juga merupakan penjabaran dari tujuan yang diperoleh secara terukur dan nyata akan dicapai dalam setiap tahun. Sasaran merupakan bagian internal dari perencanaan strategis Perangkat Daerah bersifat spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dengan berorientasi pada hasil untuk akhir periode.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD maka Sasaran yang ingin dicapai dalam rangka mendukung Tujuan terdiri dari:

Sasaran 1	: Meningkatkan Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD
Indikator Sasaran 1	: Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu
Indikator Sasaran 2	: Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu
Indikator Sasaran 3	: Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu

Adapun Sasaran 2 dalam mendukung tercapainya Tujuan adalah:

Sasaran 2	: Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel
Indikator Sasaran	: Nilai AKIP Perangkat Daerah

Tabel 3.2
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

OPD : Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Tujuan RPD : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel

Sasaran RPD : 1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah
 2. Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	IKU	Target Kinerja Sasaran		
							2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan fasilitas kegiatan DPRD dalam pelaksanaan fungsi Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan	Persentase fasilitas pelaksanaan kegiatan DPRD	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Persentase raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perda yang disahkan}}{\text{Raperda yang diusulkan}} \times 100\%$	Persen (%)	75,3	75,4	75,5
				Persentase pengesahan anggaran tepat waktu	$\frac{\text{Perda dan Perkada APBD/LP2APBD yang disahkan}}{100\%} \times$ Perda dan Perkada APBD yang disahkan tepat waktu	Persen (%)	75,3	75,4	75,5
				Persentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu	$\frac{\text{LKPJ yang disampaikan oleh Kepala Daerah}}{\text{LKPJ yang disampaikan oleh Kepala Daerah}} \times 100\%$	Persen (%)	75,3	75,4	75,5
			Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai AKIP = Nilai komponen perencanaan kinerja + Nilai komponen pengukuran kinerja + Nilai Komponen Pelaporan Kinerja + Komponen Evaluasi Internal + Nilai Komponen Capaian Kinerja	Nilai	77,7	77,8	77,9

Sumber : Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bekasi 2024-2026

Berdasarkan Tabel tersebut, perhitungan IKU Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 adalah :

1. Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu

Perhitungan IKU untuk “Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu ”dilakukan melalui: Jumlah Raperda yang diusulkan baik itu dari OPD teknis terkait maupun dari aspirasi DPRD di bagi Perda yang disahkan tepat waktu di kali 100 % dan sudah di Paripurnakan. Dan di buat laporannya dalam bentuk Daftar Raperda yang sudah di Paripurnakan.

2. Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu

Perhitungan IKU untuk “Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu” dilakukan sesuai dengan Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dimana Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi, paling lambat akhir November.

3. Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu

Perhitungan IKU untuk “Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu” dilakukan sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

4. Nilai AKIP Perangkat Daerah

Nilai AKIP dihitung berdasarkan hasil nilai dan bobot dari setiap komponen AKIP. Perhitungan nilai AKIP sebagai berikut: Nilai Komponen Perencanaan kinerja + Nilai Komponen Pengukuran Kinerja + Nilai Komponen Pelaporan Kinerja + Nilai Komponen Evaluasi Internal + Nilai Komponen Capaian Kinerja Target.

3.3. Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Bekasi yaitu dalam penyusunan perencanaan pembangunan, harus memastikan Visi dan Misi Kepala Daerah Kota Bekasi terpilih periode Tahun 2014-2026 tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD). Selanjutnya untuk memastikan perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi (RPJMD dan RKPD) dijabarkan dalam perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja).

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu.

Dengan demikian, pada tahun 2025 Sekretariat DPRD Kota Bekasi akan melaksanakan 2 (dua) program, yang terdiri dari 1 (satu) program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terdiri dari 16 (enam belas) kegiatan dan 58 (lima puluh delapan) Sub Kegiatan.

Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Program dan Kegiatan yang ada pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi yang tertuang dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Secara rinci berikut program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 serta perkiraan maju tahun 2026:

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2025 (N)		Prakiraan Maju Tahun 2026 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
4 02 01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN /KOTA	Optimalisasi Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sekretariat DPRD		Kota Bekasi		104.793.028.704		111.421.735.264
4 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
4 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	Kota Bekasi	12 Dok	40.000.000	12 Dok	45.000.000
4 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD	Lap	Kota Bekasi	3 Lap	40.000.000	3 Lap	45.000.000
4 02 01		Optimalisasi Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sekretariat DPRD						
4 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
4 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	org/ bln	Kota Bekasi	2086 org/ bln	18.729.339.000	2086 org/ bln	18.729.339.000
4 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Lapran Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lap	Kota Bekasi	2 Lap	40.000.000	2 Lap	45.000.000
4 02 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanam/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanam/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanam/ Semesteran SKPD	Lap	Kota Bekasi	15 Lap	24.000.000	15 Lap	26.000.000
4 02 01		Optimalisasi Disiplin Aparatur Sekretariat DPRD						
4 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2025 (N)		Prakiraan Maju Tahun 2026 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
4 02 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Paket	Kota Bekasi	Paket	0	Paket	0
4 02 01		Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD						
4 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
4 02 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Org	Kota Bekasi	52 Orang	379.170.000	52 Orang	379.170.000
4 02 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Org	Kota Bekasi	58 Orang	572.000.000	48 Orang	572.000.000
4 02 01		Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkatoran Sekretariat DPRD						
4 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							
4 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Kota Bekasi	1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000
4 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Kota Bekasi	4 Paket	2.937.763.000	4 Paket	2.737.763.000
4 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	Kota Bekasi	3 Paket	459.116.562	3 Paket	459.116.562
4 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dok	Kota Bekasi	4 Dok	580.000.000	4 Dok	620.000.000
4 02 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lap	Kota Bekasi	12 Lap	1.552.450.000	12 Lap	1.552.450.000
4 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap	Kota Bekasi	12 Lap	1.000.000.000	12 Lap	1.000.000.000
4 02 01		Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD						
4 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
4 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Kota Bekasi	220 Unit	2.000.000.000	220 Unit	3.575.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2025 (N)		Prakiraan Maju Tahun 2026 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
4 02 01		Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat DPRD						
4 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
4 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lap	Kota Bekasi	566 Laporan	25.000.000	566 Laporan	25.000.000
4 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Lap	Kota Bekasi	36 Lap	1.200.000.000	36 Lap	1.200.000.000
4 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Lap	Kota Bekasi	12 Lap	124.283.040	12 Lap	5.170.989.600
4 02 01		Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD						
4 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
4 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan dibayarkan pajaknya	Unit	Kota Bekasi	1 Unit	120.000.000	1 Unit	120.000.000
4 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Kota Bekasi	33 Unit	510.000.000	33 Unit	510.000.000
4 02 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	Kota Bekasi	100 Unit	100.000.000	100 Unit	150.000.000
4 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Kota Bekasi	177 Unit	832.000.000	177 Unit	832.000.000
4 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	Kota Bekasi	4 Unit	7.500.000.000	4 Unit	7.500.000.000
4 02 02		Optimalisasi Kegiatan dan Layanan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD						
4 02 02 2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD							
4 02 02 2.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	org/bln	Kota Bekasi	650 org/bln	63.942.907.102	650 org/bln	63.942.907.102

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2025 (N)		Prakiraan Maju Tahun 2026 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
4 02 02 2.15 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	Kota Bekasi	6 Paket	770.000.000	6 Paket	770.000.000
4 02 02 2.15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Org	Kota Bekasi	50 Org	165.000.000	50 Org	165.000.000
4 02 02 2..16	Layanan Administrasi DPRD							
4 02 02 2.16 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah laporan hasil fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Lap	Kota Bekasi	12 Lap	1.000.000.000	12 Lap	1.300.000.000
4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Terfasilitasinya Proses Penyusunan dan Penetapan PERDA				132.384.213.428		136.280.008.428
4 02 02 2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Terfasilitasinya Proses Penyusunan dan Penetapan Perda		Kota Bekasi				
4 02 02 2.01 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Peraturan Daerah	Dok	Kota Bekasi	2 Dok	1.700.000.000	2 Dok	2.000.000.000
4 02 02 2.01 02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dok	Kota Bekasi	10 Dok	10.504.205.000	10 Dok	12.000.000.000
4 02 02 2.01 03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	Dok	Kota Bekasi	10 Dok	5.000.000.000	10 Dok	5.000.000.000
4 02 02 2.01 04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi	Dok	Kota Bekasi	7 Dok	7.500.000.000	7 Dok	7.500.000.000
4 02 02 2.01 05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD	Dok	Kota Bekasi	1 Dok	750.000.000	1 Dok	750.000.000
4 02 02		Persentase Terpenuhinya Proses Penyusunan dan penetapan APBD dan LAPBD						
4 02 02 2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran							
4 02 02 2.02 01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dok	Kota Bekasi	1 Dok	2.000.000.000	1 Dok	2.000.000.000
4 02 02 2.02 02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dok	Kota Bekasi	1 Dok	1.500.000.000	1 Dok	1.500.000.000
4 02 02 2.02 03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dok	Kota Bekasi	1 Dok	735.000.000	1 Dok	735.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2025 (N)		Prakiraan Maju Tahun 2026 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
4 02 02 2.02 04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dok	Kota Bekasi	1 Dok	1.116.420.000	1 Dok	1.116.420.000
4 02 02 2.02 05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah okumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dok	Kota Bekasi	1 Dok	735.000.000	1 Dok	735.000.000
4 02 02 2.02 06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dikumen hasil pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dok	Kota Bekasi	1 Dok	1.500.000.000	1 Dok	1.500.000.000
4 02 02		Persentase Terfasilitasinya Kegiatan DPRD						
4 02 02 2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan							
4 02 02 2.03 01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Lap	Kota Bekasi	12 Lap	5.311.670.264	12 Lap	5.311.670.264
4 02 02 2.03 02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Lap	Kota Bekasi	12 Lap	5.311.670.264	12 Lap	5.311.670.264
4 02 02 2.03 03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Lap	Kota Bekasi	12 Lap	5.311.670.264	12 Lap	5.311.670.264
4 02 02 2.03 04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Lap	Kota Bekasi	12 Lap	5.311.670.264	12 Lap	5.311.670.264
4 02 02 2.03 06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dok	Kota Bekasi	1 Dok	1.700.000.000	1 Dok	1.700.000.000
4 02 02 2.03 07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dok	Kota Bekasi	1 Dok	9.500.000.000	1 Dok	9.500.000.000
4 02 02 2.03 08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dok	Kota Bekasi	1 Dok	2.580.833.872	1 Dok	2.580.833.872
4 02 02 2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Terfasilitasinya Kegiatan DPRD						
4 02 02 2.04 02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dok	Kota Bekasi	6 Dok	6.820.000.000	6 Dok	6.820.000.000
4 02 02 2.04 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Org	Kota Bekasi	204 Org	2.341.612.000	204 Org	2.341.612.000
4 02 02 2.04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Org	Kota Bekasi	54 Org	756.000.000	54 Org	756.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2025 (N)		Prakiraan Maju Tahun 2026 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
4 02 02 2.04 06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dok	Kota Bekasi	12 Dok	12.000.000.000	12 Dok	14.000.000.000
4 02 02 2.04 07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dok	Kota Bekasi	3 Dok	2.000.000.000	3 Dok	2.000.000.000
4 02 02 2.05	Pnyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat							
4 02 02 2.05 01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Lap	Kota Bekasi	3 Lap	284.182.500	3 Lap	284.182.500
4 02 02 2.05 02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dok	Kota Bekasi	3 Dok	1.225.000.000	3 Dok	1.325.000.000
4 02 02 2.05 03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dok	Kota Bekasi	3 Dok	11.716.825.000	3 Dok	11.716.825.000
4 02 02 2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD							
4 02 02 2.06 02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Lap	Kota Bekasi	12 Lap	3.089.068.000	12 Lap	3.089.068.000
4 02 02		Persentase Terasilinasinya Kegiatan DPRD						
4 02 02 2.08	Fasilitasi Tugas DPRD							
4 02 02 2.08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dok	Kota Bekasi	12 Dok	8.245.820.000	12 Dok	8.245.820.000
4 02 02 2.08 02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Kinerja DPRD yang Disusun	Lap	Kota Bekasi	1 Lap	1.500.000.000	1 Lap	1.500.000.000
4 02 02 2.08 03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dok	Kota Bekasi	3 Dok	13.037.566.000	3 Dok	13.037.566.000
4 02 02 2.08 04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dok	Kota Bekasi	36 Dok	1.300.000.000	36 Dok	1.300.000.000
						237.177.242.132		247.701.743.692

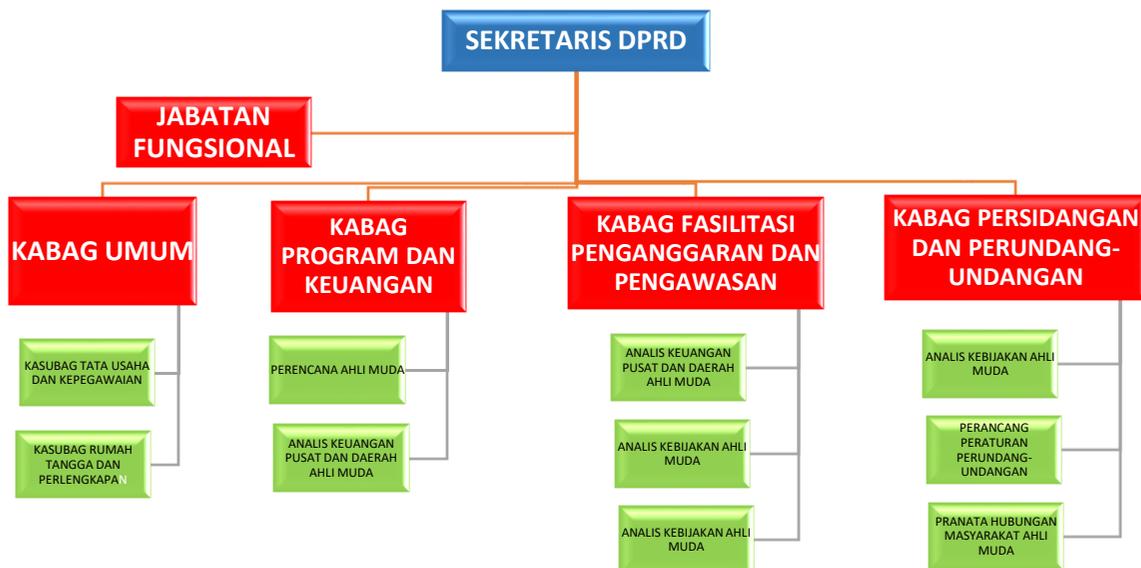
Keterangan:

- *) Terdapat perbedaan target dan pagu antara Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dan RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dikarenakan perhitungan target dan pagu dilakukan setelah RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 ditetapkan.
- **) Terdapat perbedaan target dan pagu antara Renja 2025 dan Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024-2026, terkait Perpres RI No 53 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Perpres RI No 33 Tahun 2020 Tentang Standar harga Satuan Regional.

Tugas Pokok Sekretariat DPRD Kota Bekasi adalah membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah lingkup Sekretariat DPRD Kota Bekasi yang meliputi Bagian Umum, Bagian Program dan Keuangan, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan serta Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut Sekretaris DPRD Kota Bekasi dibantu oleh 4 Kepala Bagian yaitu Kepala Bagian Program dan Keuangan, Kepala Bagian Umum, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 100 Seri D), Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berkedudukan sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kota dalam bentuk Sekretariat DPRD. Struktur organisasi pada Sekretariat DPRD disajikan pada Gambar 1.1 berikut:



Sumber : Diolah Bagian Program dan Keuangan

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Bekasi

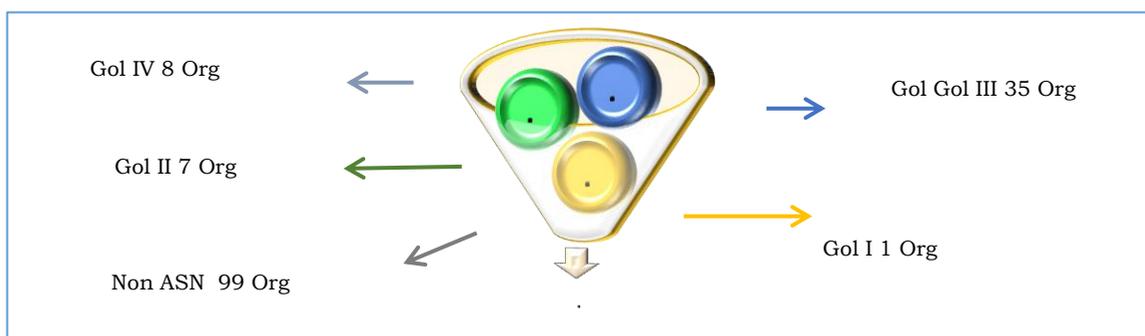
Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas:

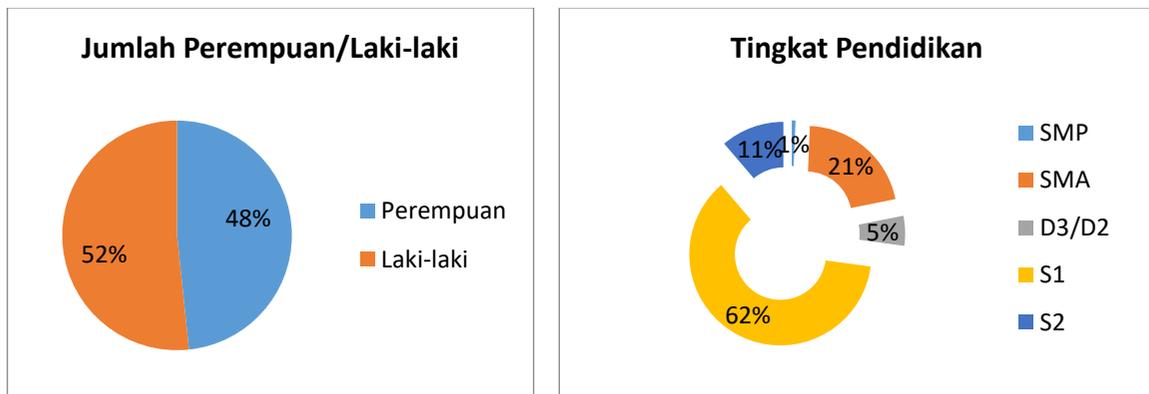
- a. Bagian Umum membawahkan:
 1. Sub. Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
- b. Bagian Program dan Keuangan
- c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
- d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing, sebagaimana Peraturan Perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugasnya, ditetapkan sub-koordinator pelaksana fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing yang mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kota Bekasi didukung oleh 151 orang aparatur yang terdiri dari 63 orang laki-laki dan 50 orang perempuan. Berdasarkan status kepegawaiannya, terdiri dari 52 orang PNS dan 99 orang Tenaga Kerja Kontrak (TKK), sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Chart 1.1
KUALIFIKASI PEGAWAI PADA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH





Sumber : Data diolah Bagian Program dan Perencanaan, 2023

Jumlah pegawai pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi adalah 151 orang, terdiri dari 52 orang ASN dan 99 orang TKK. Dari *Chart* 1.1 terlihat bahwa 52% pegawai berjenis kelamin laki-laki dan 48% berjenis kelamin perempuan. Adapun dari tingkat pendidikan yang dimiliki oleh pegawai pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi, sebagian besar pegawai memiliki tingkat pendidikan S1, 11% dengan tingkat pendidikan S2, sedangkan yang lainnya adalah D3/S2, SMA, dan SMP. Jumlah Eselon IV adalah 2 (dua) orang, hal ini dikarenakan adanya penyederhanaan birokrasi sehingga 7 (tujuh) Eselon IV sebelumnya berubah menjadi jabatan fungsional. Penyederhanaan birokrasi diharapkan dalam pengambilan keputusan akan lebih cepat, sehingga baik pelayanan atau kinerja dapat dilakukan dengan cepat dan responsif.

Secara kuantitas pegawai pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi sudah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi, namun secara kualitas masih diperlukan beberapa orang yang mempunyai keahlian dibidang perencanaan, kehumasan, dan hukum. Adapun jumlah Eselon IV adalah 2 (dua) orang, hal ini dikarenakan adanya penyederhanaan birokrasi sehingga 7 (tujuh) Eselon IV sebelumnya berubah menjadi jabatan fungsional. Penyederhanaan birokrasi diharapkan dalam pengambilan keputusan akan lebih cepat, sehingga baik pelayanan atau kinerja dapat dilakukan dengan cepat dan responsif.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI

Pada tahun 2025 Sekretariat DPRD Kota Bekasi akan melaksanakan 2 (dua) program, yang terdiri dari 16 (enam belas) kegiatan dengan 58 (lima puluh delapan) sub kegiatan. Berikut program yang dilaksanakan tahun 2025 :

I. Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota

1. Indikator Program : Optimalisasi Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- Indikator : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Kinerja : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Satuan : Dokumen

2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- Indikator : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja.
- Kinerja : Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian.
- Satuan : Laporan

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Indikator : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN.
- Kinerja : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN.
- Satuan : Laporan

2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Indikator : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Kinerja : Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Satuan : Laporan

2. Indikator Program : Optimalisasi Disiplin Aparatur Sekretariat DPRD

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Indikator : Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut bagi Aparatur Sekretariat DPRD Kota Bekasi, Jumlah Pakaian Dinas, Olahraga dan Batik bagi Aparatur Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Kinerja : Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan pada Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Satuan : Paket

3. Indikator Program : Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Indikator : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.

Kinerja : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Satuan : Orang

2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Indikator : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

Hasil : Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

Satuan : Orang

4. Indikator Program : Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran.

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Indikator : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan

Kinerja : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.

Satuan : Paket

2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan.

Kinerja : Tersedianya Bahan Logistik Kantor.

Satuan : Paket

3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Indikator : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan.

Kinerja : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan.

Satuan : Paket

4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan

Indikator) : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan.

Hasil : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

Satuan : Dokumen

5) Fasilitasi Kunjungan Tamu

Indikator : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Kinerja : Terlaksana Fasilitasi Kunjungan Tamu

Satuan : Laporan

6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Kinerja : Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Satuan : Laporan

5. Indikator Program : Optimalisasi Peningkatan Sasaran dan prasarana Aparatur Sekretariat DPRD

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

Indikator : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan.

Kinerja : Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya

Satuan : Unit

6. Indikator Program : Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat DPRD

f. Peenyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerinah Daerah**1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Kinerja : Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Satuan : Laporan

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.

Kinerja : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Satuan : Laporan

3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan.

Kinerja : Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor

Satuan : Laporan

7. Indikator Program : Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD

g. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya.

Kinerja : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

Satuan : Unit

2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya.

Kinerja : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Satuan : Unit

3) Pemeliharaan Mebel

Indikator : Jumlah Mebel yang Dipelihara.

Kinerja : Terlaksananya Pemeliharaan Mebel.

Satuan : Unit

4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

Kinerja : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Satuan : Unit.

5) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan.

Kinerja : Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya.

Satuan : Unit

6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.

Kinerja : Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Satuan : Unit

8. Indikator Program : Optimalisasi Kegiatan dan Layanan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD

h. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**1) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD**

Indikator : Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD.

Kinerja : Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD.

Satuan : Orang/bulan.

2) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD

Indikator : Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan.

Kinerja : Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD

Satuan : Paket

3) Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

Indikator : Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD

Kinerja : Terlaksananya Medical Check Up DPRD.

Satuan : Orang

i. Layanan Administrasi DPRD

1) Fasilitasi Rapat Koordinasi dan konsultasi DPRD

Indikator : Jumlah Laporan hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

Kinerja : Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

Satuan : Laporan

II. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

1. Indikator Program : Persentase Terfasilitasinya Proses Penyusunan dan Penetapan PERDA

a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

1) Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah

Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah.

Kinerja : Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah

Satuan : Dokumen

2) Pembahasan Rancangan Perda

Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

Kinerja : Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

Satuan : Dokumen

3) Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan

Indikator : Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan.

Kinerja : Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan.

Satuan : Dokumen

4) Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik

Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi.

Kinerja : Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Satuan : Dokumen

5) Fasilitasi Penyusunan Tata Tertib DPRD

Indikator : Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun.

Hasil : Tersusunnya Tata Tertib DPRD.

Satuan : Dokumen

2. Indikator Program : Persentase Terpenuhinya Proses Penyusunan dan Penetapan APBD dan LAPBD.

b. Pembahasan Kebijakan Anggaran**1) Pembahasan KUA dan PPAS**

Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS.

Kinerja : Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS.

Satuan : Dokumen.

2) Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan

Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.

Kinerja : Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.

Satuan : Dokumen.

3) Pembahasan APBD

Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD.

Kinerja : Terlaksananya Pembahasan APBD.

Satuan : Dokumen

4) Pembahasan APBD Perubahan

Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan.

Kinerja : Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan.

Satuan : Dokumen

5) Pembahasan Laporan Semester

Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester.

Kinerja : Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester.

Satuan : Dokumen

6) Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD.

Kinerja : Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD.

Satuan : Dokumen

3. Indikator Program : Persentase Terfasilitasinya Kegiatan DPRD

c. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**1) Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum**

Indikator : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum.

Kinerja : Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum.

Satuan : Laporan

2) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur

Indikator : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur.

Kinerja : Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur.

Satuan : Laporan

- 3) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat**
- Indikator : Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
- Kinerja : Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
- Satuan : Laporan
- 4) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian**
- Indikator : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian.
- Kinerja : Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
- Satuan : Laporan.
- 5) Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan**
- Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- Kinerja : Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- Satuan : Dokumen
- 6) Pengawasan Penggunaan Anggaran**
- Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran.
- Kinerja : Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran.
- Satuan : Dokumen
- 7) Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah**
- Indikator : Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
- Kinerja : Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Satuan : Dokumen

d. Peningkatan Kapasitas DPRD

1) Pendalaman Tugas DPRD

Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD.

Kinerja : Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD.

Satuan : Dokumen

2) Publikasi dan Dokumentasi Dewan

Indikator) : Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan.

Kinerja : Terlaksananya Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan.

Satuan : Dokumen

3) Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Indikator : Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Kinerja : Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Satuan : Orang

4) Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

Indikator : Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi.

Kinerja : Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi.

Satuan : Orang

5) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat

Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat

Kinerja : Terselenggaranya Hubungan Masyarakat

Satuan : Dokumen

6) Penyusun Program Kerja DPRD

Indikator : Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD.

Kinerja : Tersusunnya Rencana Kerja DPRD.

Satuan : Dokumen

e. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

1) Kunjungan Kerja dalam Daerah

Indikator : Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD

Kinerja : Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD.

Satuan : Laporan

2) Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Indikator : Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun.

Kinerja : Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD.

Satuan : Dokumen

3) Pelaksanaan Reses

Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses.

Kinerja : Terlaksananya Reses

Satuan : Dokumen

f. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

1) Pengawasan Kode Etik DPRD

Indikator : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD.

Kinerja : Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD.

Satuan : Laporan

4. Indikator Program : Persentase Terfasilitasinya Kegiatan DPRD

g. Fasilitasi Tugas DPRD

1) Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD.

Kinerja : Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD.

Satuan : Dokumen

2) Penyusunan Laporan Kinerja DPRD

Indikator : Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun.

Hasil : Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD.

Satuan : Laporan

3) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah

Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah

Hasil : Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawara.

Satuan : Dokumen

4) Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD.

Kinerja : Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD.

Satuan : Dokumen

Tabel 3.4
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2025 (N)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4 02 01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN /KOTA	Optimalisasi Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sekretariat DPRD		Kota Bekasi		104.793.028.704
4 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
4 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	Kota Bekasi	12 Dok	40.000.000
4 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lap	Kota Bekasi	3 Lap	40.000.000
4 02 01		Optimalisasi Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sekretariat DPRD				
4 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
4 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	org/ bln	Kota Bekasi	2086 org/ bulan	18.729.339.000
4 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Lapran Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lap	Kota Bekasi	2 Lap	40.000.000
4 02 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanam/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanam/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan an/ Semesteran SKPD	Lap	Kota Bekasi	15 Lap	24.000.000
4 02 01		Optimalisasi Disiplin Aparatur Sekretariat DPRD				
4 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
4 02 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Paket	Kota Bekasi	Paket	0
4 02 01		Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD				

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2025 (N)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
4 02 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Org	Kota Bekasi	52 Orang	379.170.000
4 02 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Org	Kota Bekasi	48 Orang	572.000.000
4 02 01		Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat DPRD				
4 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
4 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Kota Bekasi	1 Paket	150.000.000
4 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Kota Bekasi	4 Paket	2.937.763.000
4 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	Kota Bekasi	3 Paket	459.116.562
4 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dok	Kota Bekasi	4 Dok	580.000.000
4 02 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Lap	Kota Bekasi	12 Lap	1.552.450.000
4 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap	Kota Bekasi	12 Lap	1.000.000.000
4 02 01		Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD				
4 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
4 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Kota Bekasi	220 Unit	2.000.000.000
4 02 01		Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat DPRD				
4 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
4 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lap	Kota Bekasi	566 Laporan	25.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2025 (N)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Lap	Kota Bekasi	36 Lap	1.200.000.000
4 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Lap	Kota Bekasi	12 Lap	124.283.040
4 02 01		Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD				
4 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
4 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan dibayarkan pajaknya	Unit	Kota Bekasi	1 Unit	120.000.000
4 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Kota Bekasi	33 Unit	510.000.000
4 02 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	Kota Bekasi	100 Unit	100.000.000
4 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Kota Bekasi	177 Unit	832.000.000
4 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	Kota Bekasi	4 Unit	7.500.000.000
4 02 02		Optimalisasi Kegiatan dan Layanan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD				
4 02 02 2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD					
4 02 02 2.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	org/bln	Kota Bekasi	650 org/bln	63.942.907.102
4 02 02 2.15 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	Kota Bekasi	6 Paket	770.000.000
4 02 02 2.15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Org	Kota Bekasi	50 Org	165.000.000
4 02 02 2..16	Layanan Administrasi DPRD					
4 02 02 2.16 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah laporan hasil fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Lap	Kota Bekasi	12 Lap	1.000.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2025 (N)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Terasilinasinya Proses Penyusunan dan Penetapan PERDA		Kota Bekasi		132.384.213.428
4 02 02 2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD					
4 02 02 2.01 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Peraturan Daerah	Dok	Kota Bekasi	2 Dok	1.700.000.000
4 02 02 2.01 02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dok	Kota Bekasi	10 Dok	10.504.205.000
4 02 02 2.01 03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	Dok	Kota Bekasi	10 Dok	5.000.000.000
4 02 02 2.01 04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi	Dok	Kota Bekasi	7 Dok	7.500.000.000
4 02 02 2.01 05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD	Dok	Kota Bekasi	1 Dok	750.000.000
4 02 02		Persentase Terpenuhinya Proses Panyusunan dan Penetapan APBD dan LAPBD				
4 02 02 2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran					
4 02 02 2.02 01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dok	Kota Bekasi	1 Dok	2.000.000.000
4 02 02 2.02 02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dok	Kota Bekasi	1 Dok	1.500.000.000
4 02 02 2.02 03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dok	Kota Bekasi	1 Dok	735.000.000
4 02 02 2.02 04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dok	Kota Bekasi	1 Dok	1.116.420.000
4 02 02 2.02 05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dok	Kota Bekasi	1 Dok	735.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2025 (N)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4 02 02 2.02 06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen hasil pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dok	Kota Bekasi	1 Dok	1.500.000.000
4 02 02		Persentase Terasilinasinya kegiatan DPRD				
4 02 02 2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan					
4 02 02 2.03 01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Lap	Kota Bekasi	12 Lap	5.311.670.264
4 02 02 2.03 02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Lap	Kota Bekasi	12 Lap	5.311.670.264
4 02 02 2.03 03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Lap	Kota Bekasi	12 Lap	5.311.670.264
4 02 02 2.03 04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Lap	Kota Bekasi	12 Lap	5.311.670.264
4 02 02 2.03 06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dok	Kota Bekasi	1 Dok	1.700.000.000
4 02 02 2.03 07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dok	Kota Bekasi	1 Dok	9.500.000.000
4 02 02 2.03 08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dok	Kota Bekasi	1 Dok	2.580.833.872
4 02 02 2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD					
4 02 02 2.04 02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dok	Kota Bekasi	6 Dok	6.820.000.000
4 02 02 2.04 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Org	Kota Bekasi	204 Org	2.341.612.000
4 02 02 2.04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Org	Kota Bekasi	54 Org	756.000.000
4 02 02 2.04 06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dok	Kota Bekasi	12 Dok	12.000.000.000
4 02 02 2.04 07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dok	Kota Bekasi	3 Dok	2.000.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2025 (N)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4 02 02 2.05	Pnyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat					
4 02 02 2.05 01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Lap	Kota Bekasi	3 Lap	284.182.500
4 02 02 2.05 02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dok	Kota Bekasi	3 Dok	1.225.000.000
4 02 02 2.05 03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dok	Kota Bekasi	3 Dok	11.716.825.000
4 02 02 2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD					
4 02 02 2.06 02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Lap	Kota Bekasi	12 Lap	3.089.068.000
4 02 02		Persentase Terfasilitasinya Kegiatan DPRD				
4 02 02 2.08	Fasilitasi Tugas DPRD					
4 02 02 2.08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dok	Kota Bekasi	12 Dok	8.245.820.000
4 02 02 2.08 02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Kinerja DPRD yang Disusun	Lap	Kota Bekasi	1 Lap	1.500.000.000
4 02 02 2.08 03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dok	Kota Bekasi	3 Dok	13.037.566.000
4 02 02 2.08 04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dok	Kota Bekasi	12 Dok	1.300.000.000
						237.177.242.132

Keterangan:

- *) Terdapat perbedaan target dan pagu antara Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dan RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dikarenakan perhitungan target dan pagu dilakukan setelah RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 ditetapkan.
- ***) Terdapat perbedaan target dan pagu antara Renja 2025 dan Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024-2026, terkait Perpres RI No 53 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Perpres RI No 33 Tahun 2020 Tentang Standar harga Satuan Regional.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 merupakan penjabaran Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dan mengacu pada RKPD Kota Bekasi Tahun 2025.

Proses penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 mempertimbangkan potensi sumber daya yang dibutuhkan dalam menghadapi isu-isu dan permasalahan yang telah teridentifikasi sehingga diharapkan akan mampu menjawab permasalahan dan memperbaiki kualitas *output* perencanaan dan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap capaian kinerja yang dilakukan oleh berbagai komponen pemerintah daerah.

Proses penyusunan Renja ini memerlukan keterlibatan dari seluruh elemen yang terkait dan berkepentingan dengan organisasi baik dari internal maupun eksternal organisasi. Keterlibatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan motivasi lembaga untuk melaksanakan program dan kegiatan indikatif yang terdapat dalam Renja secara fokus dan konsisten serta meningkatkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan

Adapun kaidah pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Sekretaris DPRD Kota Bekasi;
2. Seluruh komponen bagian, sub bagian pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi agar menyempurnakan Program dan Kegiatan dalam Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya;
3. Program-program yang tercantum dalam Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 diupayakan untuk dilaksanakan seluruhnya dengan memperhatikan prioritas pembangunan serta ketersediaan anggaran;
4. Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai dan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD);
5. Agar Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 dapat dilaksanakan dan memberikan hasil yang diharapkan, maka setiap komponen Sekretariat DPRD Kota Bekasi diharapkan mengupayakan penguatan peran

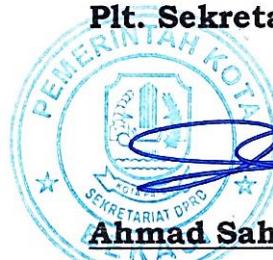
stakeholder dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target-target Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025, baik kepada seluruh komponen aparat yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Instansi terkait maupun masyarakat luas;

6. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Renja Sekretariat Kota Bekasi Tahun 2025, dipandang perlu untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024, sebagai berikut:
 - a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing bagian;
 - b. Sekretaris DPRD Kota Bekasi menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing bidang sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 - c. Kepala Bagian melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja bagaian periode sebelumnya;
 - d. Sekretaris DPRD Kota Bekasi menyusun evaluasi Renja berdasarkan hasil evaluasi bagaian-bagian sebagaimana dimaksud pada huruf;
 - e. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) menjadi bahan bagi penyusunan Renja untuk periode berikutnya;
 - f. Apabila terjadi perubahan kebijakan daerah maupun kebijakan nasional selama tahun 2025, Sekretariat DPRD Kota Bekasi akan melakukan perubahan-perubahan demi kesempurnaan Renja ini.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal Mei 2024

Plt. Sekretaris DPRD Kota Bekasi



Ahmad Sahroni, S.Sos, M.Si
Pembina/IVa

NIP. 19740706 200604 1 009